

**OPTIMIZATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF
CITY OF SINGKAWANG NUMBER 3 YEAR 2011 ABOUT RETRIBUTI
GENERAL SERVICES IN ORDER TO IMPROVE
LOCALLY-GENERATED REVENUE**

OLEH :

**MUCHLIS KURNIANTO, SH
NPM. A2021131010**

ABSTRACT

This thesis discusses the optimization of the implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 Concerning Public service levies in order to increase revenue. The method used in this research is a sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that implementation of the Regional Regulation No. 3 of 2011, especially regarding the Service Fees for market, the government set targets to be achieved or realized annually. In the Year 2012 revenue target of approximately Markets Service Fees meet government expectations Singkawang, this is due to the management levy less orderly market. To overcome this, local governments need to implement the following measures, identify and re-registration of the mandatory levy in order to get accurate data and more easily implement pemunggutan market retribution. In addition to these prevention efforts. It also occurs in Health Service Retribution either be collected based on the Regulation of City of Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies contributed enormously in revenue structure of Public service levies for the Local Revenue Singkawang. However, the amount of revenue from levies Health Service is also coupled with the magnitude of budgeting in the budget to provide health services to people in Singkawang. arriers caused not optimal implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies is lack of socialization of the Regulation to the officers and the community resulted in the implementation of public services at less than the maximum, infrastructure or physical facilities inadequate and human Resources are not fully support becomes less maximal optimalisai implementation Singkawang Regional Regulation No. 3 of 2011 on Public service levies. What efforts should be done by the Government Singkawang in order to implement the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies in order to increase revenue is by increasing the dissemination to the public about the content of regulation, to revise the content of the regulations by adding legal sanctions pemugutan firmly in the public service levies and provide training / education and training to the officers of the local regulation ..

**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

ABSTRAK

Tesis ini membahas optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 khususnya menyangkut Retribusi Pelayanan Pasar, pemerintah menetapkan target yang harus dicapai atau direalisasikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 target penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar kurang memenuhi harapan pemerintah kota Singkawang, hal ini disebabkan manajemen retribusi pasar yang kurang tertib. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya-upaya berikut, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga didapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Selain upaya-upaya penanggulangan tersebut. Hal ini juga terjadi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan baik yang dipungut dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi yang sangat besar dalam struktur penerimaan dari Retribusi Jasa Umum bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang. Namun demikian, besarnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan ini juga dibarengi dengan besarnya penganggaran dalam APBD untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang. Hambatan-hambatan yang menyebabkan belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat mengakibatkan implementasi pelayanan jasa umum di kurang maksimal, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai dan Sumber Daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung menjadi kurang maksimalnya optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang isi perda, merivisi isi perda dengan menambahkan sanksi hukum yang tegas dalam pemugutan retribusi jasa umum dan memberikan pelatihan/diklat kepada petugas pelaksana peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Jasa Umum, Meningkatkan, Pendapatan, Asli Daerah

Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 285 menyatakan:

“Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. hasil pajak daerah;
 2. hasil retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.”

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemda di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77.

Selanjutnya diantara komponen Pendapatan Asli Daerah, perlu dicermati komponen pajak daerah dan retribusi daerah yaitu aspek yuridis yang berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kajian yuridis landasan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang-undang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 286 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: ” Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dilakukan melalui produk hukum berupa peraturan daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan Perda.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak dan retribusi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yakni : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Sehubungan dengan retribusi jasa umum, Pemerintah Daerah

Kota Singkawang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Kota Singkawang sebagai salah satu pemerintahan di daerah perlu mengatur Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum, sekalipun dalam pelaksanaannya telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun Peraturan Daerah yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 disebutkan bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan Retribusi Jasa Umum yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah selalu menjadi pembahasan penting termasuk bagaimana strateginya. Hal ini mengingat bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001. Belum adanya kontribusi atau perubahan yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Singkawang sampai saat ini (khususnya Retribusi Jasa Umum) disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Pemerintah Kota Singkawang dalam membuat strategi koleksi dan memetakan potensi Retribusi Jasa Umum. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan Retribusi Jasa Umum, itupun dengan

estimasi yang seringkali tidak akurat tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, ada banyak faktor yang menjadi penghambat, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan. Permasalahan dalam proses pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk setiap jenis penerimaan terdapat perbedaan cara penanganan atau pengelolaannya. Secara umum hambatan atau kendala dalam merealisasikan potensi antara lain adalah :

- a. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib retribusi jasa umum dalam membayar retribusi jasa umum. Petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum.
- b. Masih lemahnya pengawasan termasuk instrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah yang kurang atau tidak efektif perlu dilakukan pengkajian, sehingga ke depan diharapkan adanya perbaikan. Eksistensi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdampak pada peningkatan PAD Kota Singkawang namun persentasenya masih kecil jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Tahun 2015 target penerimaan dari PAD Kota Singkawang sebesar Rp. 103.524.412.318,00,- dan sampai September 2015 terealisasi sebesar

Rp. 64.751.250.918,00,- atau sebesar 62,55 %. Pada tahun 2015 target penerimaan daerah dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 7.220.016.282,00,- dan terealisasi sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 5.752.390.759,00,-.

Dari uraian di atas tergambar bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, memiliki relevansi bagi peningkatan PAD Kota Singkawang, sehingga diperlukan untuk dikembangkan. Potensi Retribusi Jasa Umum masih cukup banyak yang perlu digali oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD khususnya dari retribusi jasa umum.

Keinginan Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah termasuk retribusi jasa umum juga terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016, yaitu Kebijakan umum pendapatan daerah diupayakan untuk mengali berbagai potensi daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah dari sumber lainnya seperti sektor pajak, retribusi dan pengoptimalkan perolehan dana perimbangan.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan catatan bagi prospek keuangan daerah Kota Singkawang ke depan antara lain adalah bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD untuk beberapa tahun ke depan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, berbagai upaya baik ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak dan retribusi tanpa harus menambah beban kepada masyarakat, maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus

dalam melakukan perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya, adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten, termasuk di dalamnya upaya untuk terus meningkatkan efisiensi di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengaliran pendapatan asli daerah termasuk dari retribusi jasa umum sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Potensi sumber pendapatan asli daerah dari retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 di Kota Singkawang cukup besar, sehingga diperlukan berbagai upaya dari pemerintah daerah untuk secara optimal menggali sumber pendapatan asli daerah, karena dengan pendapatan asli daerah yang besar, maka berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk tesis dengan judul **"OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH"**.

Rumusan Masalah

Dalam bidang hukum, banyak masalah-masalah yang dapat ditemukan, kemudian diteliti secara seksama. Akan tetapi menjadi persoalan yang dihadapi peneliti adalah bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dalam penelitian secara jelas dan lengkap. Sehingga dalam mendapatkan jawaban permasalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang dituju. Menurut Bambang Sunggono, dalam bukunya "Metodelogi

Penelitian Hukum” menyatakan bahwa : Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.²

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum selama ini ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ?
3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

Pembahasan

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan ada tiga elemen sistem hukum yang menentukan berfungsinya suatu hukum, yaitu: *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut

² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 105-106.

sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula. Jadi, hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek subsistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Sehingga hukum dapat berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya.³⁴

Berdasarkan analisis data ini penulis menguraikan implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan suatu teori atau pisau analisis, yaitu:.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Singkawang berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat melalui RSUD, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan lain sebagainya. Berbagai sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Singkawang masih terbatas baik dari sisi sarana prasarana maupun tenaga

⁴⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 356-357.

medisnya, dan hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya pendanaan, sehingga diperlukan adanya dukungan masyarakat melalui pungutan dalam bentuk Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berarti juga berdampak bagi penerimaan atau pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan pada tabel berikut ini :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas :

Tabel 1

NO	PELAYANAN	TINGKAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL BIAYA
1.	Rawat Jalan A. Poli Umum B. Poli Gigi C. Poli Mata D. Poli KIA E. Poli Spesialis		6.000 6.000 6.000 6.000 6.000	4.000 4.000 4.000 4.000 15.000	10.000 10.000 10.000 10.000 20.000
2.	Rawat Inap A. Rawat Inap Umum B. Rawat Inap Bayi C. Bayi Normal D. Bayi dengan resiko		10.000 5.000 10.000	10.000 10.000 15.000	20.000 15.000 25.000
3.	Tindakan medik operatif	Kecil Sedang Besar	10.000 15.000 20.000	5.000 15.000 50.000	15.000 30.000 70.000
4.	Tindakan Medik Non Operatif	Kecil Sedang	8.000 10.000	5.000 10.000	13.000 20.000
5.	Penunjang Diagnostic A. Laboratorium B. Radiologi C. Pemeriksaan USG D. Elektro Kardiogram	Sederhana Sedang Canggih Sederhana Sedang Dengan Film Tanpa Film	4.000 6.000 10.000 15.000 100.000 40.000 25.000 20.000	4.000 4.000 20.000 15.000 25.000 10.000 10.000 10.000	8.000 10.000 30.000 30.000 125.000 50.000 35.000 30.000

	E. Pemeriksaan Visus Mata		5.000	5.000	10.000
	F. Pemeriksaan Doppler			5.000	5.000
6.	Kebidanan, Genokology				
	A. Persalinan normal		100.000	350.000	450.000
	B. Persalinan dengan penyakit		150.000	450.000	600.000
	C. Persalinan dengan tindakan		150.000	500.000	500.000
	D. Kuret		150.000	400.000	650.000
7.	Neonatalogi/Bayi baru lahir				
	A. Hasil Persalinan Normal		5.000	20.000	25.000
	B. Hasil Persalinan dengan tindakan		20.000	30.000	50.000
8.	Rehabilitasi Medik, Mental Fisioterapy	Sederhana Sedang Canggih	5.000 10.000 20.000	5.000 10.000 20.000	10.000 20.000 40.000
9.	Konsultasi Kesehatan	Tenaga Ahli Madya Tenaga Ahli Tenaga Spesialis		5.000 8.000 10.000	5.000 8.000 10.000
10.	Mediko Legal Pemeriksaan Fisik Oleh Petugas			10.000	10.000
11.	Penunjang Non Medik				
	A. Ambulance Dalam Kota	Supir	25.000	S= 25.000	50.000
		Supir dan Perawat	25.000	S= 25.000 P= 25.000	75.000
		Supir, Perawat dan Dokter	25.000	S= 25.000 P= 25.000 Dr= 50.000	125.000
	B. Ambulance luar kota (Maksimal 200 km)	Supir	250.000	S= 100.000	350.000
		Supir dan Perawat	250.000	S= 100.000 P= 100.000	450.000
		Supir, Perawat dan Dokter	250.000	S= 100.000 P= 100.000 Dr= 150.000	600.000
12.	Visum Et Repertum			50.000	50.000

b. Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah :

Tabel

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KLS.III	KLS.II	KLS.I	KLS.VIP
1.	Rawat Jalan A. Jasa pelayanan dr. Umum B. Jasa pelayanan dr. Spesialis	Rp. 15.000 Rp. 25.000				
2.	Rawat Inap A. Rapat Inap Umum B. Rapat Inap Bayi 1. Bayi normal 2. Bayi dengan resiko C. Rawat Inap Khusus a) ICCU/ICU Syrege Pump Monitor EKG Ventilator SPO 2 b) NICU		20.000 10.000 20.000 75.000 30.000 30.000 150.000 30.000 75.000	75.000 35.000 75.000 150.000 40.000 40.000 250.000 40.000 150.000	125.000 60.000 125.000 250.000 50.000 50.000 350.000 50.000 250.000	250.000 125.000 250.000 350.000 60.000 60.000 450.000 60.000 350.000
3.	Tindakan Medik Operatif	Kecil Sedang Besar Khusus	50.000 500.000 700.000 1.000.000	150.000 1.050.00 1.500.00 2.700.000	225.000 1.200.000 1.800.000 3.300.000	275.000 1.600.000 2.100.000 3.900.000
4.	Tindakan Medik Non Operatif	Kecil Sedang Besar Khusus	20.000 200.000 260.000 500.000	45.000 300.000 450.000 900.000	75.000 400.000 600.000 1.200.000	150.000 600.000 900.000 1.800.000
5.	Pelayanan Penunjang Diagnostik A. Laboratorium B. Radiologi C. Pemeriksaan USG D. Elektron Kardiogram E. Endoscopy	Sederhana Sedang Canggih Sederhana Sedang Canggih Dengan Film Tanpa Film	5.000 10.000 30.000 30.000 125.000 250.000 50.000 35.000 500.000	12.000 30.000 70.000 54.000 200.000 450.000 75.000 50.000 1.000.000	15.000 40.000 80.000 60.000 250.000 500.000 100.000 70.000 1.200.000	22.500 45.000 100.000 80.000 300.000 700.000 225.000 90.000 600.000
6.	Pelayanan Kebidanan dan Genokology A. Persalinan Normal B. Persalinan dengan penyulit C. Persalinan PV dengan tindakan (Vakum ekstr, forseps ekstr, versi ekstr)		250.000 350.000 450.000	350.000 450.000 600.000	500.000 600.000 750.000	700.000 800.000 900.000

	D. Kuret		250.000	350.000	500.000	700.000
7.	Pelayanan Neonatologi (bayi baru lahir) A. Hasil persalinan normal B. Hasil persalinan dengan penyulit		20.000 100.000	60.000 150.000	100.000 200.000	140.000 250.000
8.	Rehabilitasi Medik,Mental Fisiotherapy A. dr SP Rehap Medik B. Fisioterapist	Sederhana Sedang Canggih Khusus Sederhana Sedang Canggih	20.000 200.000 260.000 500.000 10.000 21.000 54.000	45.000 300.000 450.000 900.000 13.500 26.000 72.000	75.000 400.000 600.000 1.200.000 22.500 37.000 107.000	150.000 600.000 900.000 1.800.000 27.500 44.000 135.000
9.	Konsultasi Dokter Diluar Jam Dinas A. Dr. Spesialis			20.000	30.000	40.000
10.	Pelayanan konsultasi khusus			20.000	30.000	50.000
11.	Visum Et Repertum					75.000
12.	Perawatan dan Pemulasaran Jenazah A. Perawatan Jenazah/memandikan B. Penitipan Jenazah/hari C. Pengawetan Jenazah/Formalin D. Pemeriksaan Luar Jenazah					75.000 75.000 500.000 150.000

14.	Pelayanan Medical Cek Up A. Paket Standar 1. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum 2. Konsultasi Dokter Spesialis 3. Pemeriksaan Penunjang Medik a. Laboratorium - Darah rutin Hb Leukosit LED Hitung Jenis - Kimia Darah SGOT SGPT Kolesterol HDL Trigliceride Creatin Glukosa darah - Urine Lengkap b. Radiologi Photo Thoraks c. EKG				22.000 30.000 12.000 12.000 12.000 12.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 54.000 30.000	
	JUMLAH				424.000	
	B. Paket Standar Plus 1. Konsultasi Dokter Spesialis a. Penyakit dalam b. Mata c. Patologi klinik 2. Pemeriksaan Penunjang Medik a. Laboratorium - Darah Rutin Hb Leukosit LED Hitung Jenis - Kimia Darah SGOT SGPT Kolesterol HDL Trigliceride Ureum Creatin HbsAg Glukosa darah 1		30.000 30.000 30.000 12.000 12.000 12.000 12.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000			

	Glukosa darah 2		30.000			
	- Urine rutin		30.000			
	b. Radiologi Photo Thoraks		54.000			
	c. EKG		30.000			
	d. Pemeriksaan USG		60.000			
	JUMLAH		642.000			

Dalam implementasinya, target dan realisasi penerimaan dari Retribusi pelayanan kesehatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3

No	Tahun Anggaran	Target Retribusi	Realisasi Penerimaan	Efektivitas Retribusi (%)
1	2013	Rp. 22.128.395.592.,	Rp.18.730.513.528.,	78,83%.
2	2014	Rp. 4.379.814.600.,	RP. 3.079.353.500.,	70,31%.
2	2015	Rp. 1.066.156.282.,	RP. 571.605.000.,	53,61%

Sumber data :

Dari data di atas tergambar bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan baik yang dipunggut dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi yang sangat besar dalam struktur penerimaan dari Retribusi Jasa Umum bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang. Namun demikian, besarnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan ini juga dibarengi dengan besarnya penganggaran dalam APBD untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti tersebut di atas berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr.Abdul Aziz Kelas B Singkawang dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Terdapat kontradiksi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, di mana di satu sisi Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan

bersifat sosial yang harus dijalankan secara profesional sebagai salah satu wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan di sisi lain sebagai salah satu unit kerja yang harus memberikan kontribusi bagi PAD Kota Singkawang melalui Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dengan kondisi di atas, maka mulai tahun 2014 pengelolaan pelayanan kesehatan di Kota Singkawang dilakukan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Singkawang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas⁵.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah Kota Singkawang dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.

⁵ hasil wawancara dengan Bapak Abdul Samad Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang

Berdasarkan uraian di atas, maka sejak Tahun 2014 tidak ada lagi penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011. Dengan demikian, potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2014 sudah tidak berpotensi lagi dalam meningkatkan PAD Kota Singkawang dari Retribusi Jasa Umum.

2. Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasar merupakan sarana perekonomian masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Singkawang, sehingga pengaturan mengenai Pengelolaan Pasar perlu dilakukan, baik untuk mengatur dalam rangka menciptakan ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum maupun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jaminan perlindungan dan kepastian hukum tidak hanya diperlukan pada peraturan yang mengatur masalah-masalah yang terkait langsung dengan bidang perekonomian atau investasi saja, tetapi lebih dari itu berbagai peraturan perundangan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keberadaan atau keberlangsungan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dituntut berpihak pada kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat kewenangan Pemerintah Kota Singkawang dalam mengatur atau memungut retribusi terkait dengan Pasar, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 110 ayat (1) huruf f, dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang masuk dalam jenis

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf b. Dalam Pasal 116 UU No. 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi ini adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti bahwa apabila Pemerintah Kota Singkawang akan menarik retribusi pelayanan pasar, maka yang dapat ditarik adalah para pedagang yang mempergunakan fasilitas pasar tradisional/serhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Berdasarkan ketentuan di atas berarti pemerintah daerah Kota Singkawang dapat memunggut retribusi terhadap berbagai penyediaan fasilitas terkait dengan pasar, baik Retribusi Pelayanan Pasar maupun Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pemungutan retribusi harus diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas di wilayah pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan

untuk pedagang. Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Sedangkan Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Subjek Retribusi merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 khususnya menyangkut Retribusi Pelayanan Pasar, pemerintah menetapkan target yang harus dicapai atau direalisasikan setiap tahunnya.

Tabel 4

No	Tahun	Target Retribusi	Realisasi Penerimaan	Efektivitas Retribusi (%)
1	2013	Rp. 310.860.000.,	Rp. 164.020.000.,	52,76%
2	2014	Rp. 310.860.000.,	Rp. 155.910.000.,	50,15%.
3	2015	Rp. 310.860.000.,	Rp. 333.410.000.,	107,25 %

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa penerimaan daerah bagi PAD Kota Singkawang dari Retribusi Pelayanan Pasar cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar bagi PAD Kota Singkawang masih kecil dalam struktur PAD. Terjadinya penurunan target dan realisasi dari Retribusi Pelayanan Pasar ini dikarenakan kondisi pasar yang semakin memburuk, letak pasar tidak strategis, dan kurangnya dukungan masyarakat⁶.

Penyebab lain adalah manajemen retribusi pasar yang kurang tertib dan belum adanya penyesuaian tarif retribusi pasar terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tarif retribusi lain sudah mengalami penyesuaian. Untuk mengatasi

⁶ hasil wawancara dengan Bapak Deddy Zahedi, Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

hal tersebut pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya-upaya berikut, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga didapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan pemungutan retribusi pasar; melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang retribusi pasar sehingga sesuai dengan keadaan sekarang; mengadakan sosialisasi Perda yang baru sehingga wajib retribusi mengerti hak dan kewajibannya, meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi pasar, meningkatkan sumber daya manusia pelaksana pemungutan retribusi pasar dengan mengadakan penyuluhan dan pendidikan.

Jika kondisi pasar yang ada saat ini tidak dilakukan perbaikan terutama dari sisi fisik bangunan, maka target dan realisasi dari Retribusi Pelayanan Pasar akan terus mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan peningkatan/perbaikan atau membangun fisik pasar baru dengan mencari lokasi yang strategis dan dapat mempermudah masyarakat untuk berjualan maupun berbelanja di pasar tersebut. Selama ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sudah melakukan berbagai upaya melakukan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah daerah seperti sosialisasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar. Selain itu juga melakukan rapat-rapat internal dengan petugas pasar untuk mengetahui perkembangan kondisi pasar ⁷.

Masalah PKL yang berjualan tidak pada tempatnya juga merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh pengelola pasar, dan Satpol PP sudah

⁷ hasil wawancara dengan Bapak Deddy Zahedi, Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

melakukan kegiatan penertiban mengenai hal ini bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Peluang peningkatan PAD dari Retribusi Pelayanan Pasar ke depan masih terbuka peluang untuk ditingkatkan, asalkan adanya perbaikan fisik bangunan pasar atau membangun pasar baru yang lebih strategis dan representatif, karena animo masyarakat untuk berbelanja di pasar terutama pasar tradisional masih cukup tinggi.

Dukungan sarana prasarana terutama bangunan fisik pasar dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar mutlak harus dilakukan karena hal itu yang utama dan wajib disiapkan oleh pemerintah daerah (objek retribusi). Selain itu juga perlu penguatan kelembagaan dalam pengelolaan pasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar dan penarikan retribusi.

3. Retribusi Parkir Jalan Umum

Pemungutan Retribusi Parkir Jalan Umum di Kota Singkawang adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sendiri menetapkan angka yang telah ditargetkan Pemkot untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah di sektor Parkir. Jalan umum ditinjau dari tahun 2013 sampai tahun

2015 ini Retribusi parkir jalan umum mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota singkawang dan yang melatarbelakangi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah wajib retribusi yang selalu taat membayar retribusi khususnya retribusi parkir jalan umum tersebut. Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi parkir jalan umum di Kota singkawang telah memberi masukan yang cukup berarti untuk kelangsungan pembangunan daerah.

Berikut adalah data perolehan dana dari retribusi parkir dalam tiga tahun yakni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 5

No	Tahun	Target Retribusi	Realisasi Penerimaan	Efektivitas Retribusi (%)
2	2013	Rp. 150.000.000	Rp. 149.250.000	99,50 %
3	2014	Rp. 500.000.000	Rp. 161.010.000	32,20 %
5	2015	Rp. 350.000.000	Rp. 180.700.000	51,63 %

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Berdasarkan data tabel di atas, walaupun peranannya kecil, dari tahun ke tahun retribusi parkir mampu memberikan kontribusinya kurang mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Singkawang bahkan untuk Tahun 2017 ini pihak perparkiran optimis bisa memberikan kontribusi melebihi dari yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Walau retribusi parkir jalan umum berperan kecil bagi Pendapatan Asli Daerah, retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Daerah, karena apabila retribusi parkir tidak dapat memberikan kontribusi sesuai target beberapa persen saja maka Pendapatan Daerah juga akan berkurang.

B. Hambatan-Hambatan yang Menyebabkan Belum Optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Singkawang yang menyebabkan belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum juga menggunakan pisau analisis data yang diperoleh dilapangan menjadi 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Struktur, yaitu hambatan yang ada dari segi aparatur/petugas pelaksana pemungut retribusi sudah memadai, baik dari jumlah dan kompetensinya, dan sarana dan prasarana yang digunakan
2. Subtansi, yaitu hambatan-hambatan dari segi norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang di jadikan dasar dalam retribusi jasa umum.
3. Kultur, yaitu ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat dari Pelaksana Retribusi Jasa Umum maupun masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi jasa umum antara lain :

1. Struktur

Terdapat beberapa hambatan dari segi struktur, yaitu petugas teknis penyelenggara retribusi jasa umum, Sarana Prasarana dan Pembiayaan:

- a. Petugas teknis penyelenggara retribusi jasa umum
 1. Petugas teknis dan manajemen dalam retribusi pelayanan pasar.

Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi dan kurangnya pengawasan. Dalam memungut retribusi senantiasa bertindak kurang tegas kepada para wajib retribusi. Hal ini dikarenakan petugas kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada sikap sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi. Penyebab lain adalah manajemen retribusi pelayanan pasar yang kurang tertib.⁸

2. Petugas teknis dalam retribusi pelayanan kesehatan.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi sebuah organisasi. Dengan jumlah petugas yang memadai, maka secara otomatis akan membantu proses pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan kesehatan berjalan lebih maksimal. Hal ini terkait dengan petugas pemungut dan Puskesmas yang bertugas untuk memungut retribusi secara langsung ke wajib retribusi. Puskesmas hanya memiliki 1 (satu) petugas pemungut retribusi pelayanan kesehatan untuk setiap Kecamatan yang ada di Kota Singkawang.

Keterbatasan jumlah petugas pemungut retribusi pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Singkawang ini merupakan kendala paling besar yang dihadapi oleh Puskesmas. Tidak sedikit petugas yang mengeluhkan adanya kekurangan sumber daya manusia dalam memungut retribusi pelayanan kesehatan ini. Rangkap kerja yang

⁸ hasil wawancara dengan Bapak Deddy Zahedi, Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

dilakukan oleh petugas menyulitkan Puskesmas dalam hal melayani masyarakat, hal ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam kualitas dan kuantitas yang diberikan Puskesmas. Dampak lain yang ditimbulkan yaitu keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan jumlah penerimaan retribusi. Terbatasnya jumlah petugas dalam memungut retribusi seringkali berdampak pada telatnya pelaporan penerimaan retribusi ke Dinas Kesehatan. Seharusnya Pemerintah Daerah harus bersiap menambah jumlah petugas disertai dengan peningkatan kualitas pemungut.

Pemberian pelayanan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai baik dan segi kuantitas maupun kualitas. Pelayanan kesehatan akan berjalan optimal jika didukung dengan tersedianya fasilitas dan alat-alat kesehatan yang memadai untuk menjangkau seluruh pelayanan yang diberikan.

Penampilan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas belum optimal. Pengelolaan manajemen logistik, tenaga kesehatan, dan biaya operasional sangat menentukan mutu pelayanan yang diberikan. Walaupun sarana pada Puskesmas bagus tetapi fasilitas alat kesehatan tidak memadai akan mengurangi jumlah pasien yang datang sehingga menurunkan jumlah target penerimaan

Kurangnya fasilitas alat kesehatan di Puskesmas secara otomatis akan menghambat jasa pelayanan yang diberikan. Pemerintah daerah

hams terus menjaga agar pemberian pelayanan kesehatan secara optimal kepada wajib retribusi yang tidak terlepas dan ketersediaan sarana dan prasarana baik dari kuantitas maupun kualitas.

Sarana dalam melaksanakan penegakan hukum berupa sanksi baik administrasi berupa bunga, denda, maupun pidana atas kelalaian wajib retribusi yang tidak membayar atau terlambat melakukan pembayaran. Pemberian sanksi tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan penegakan hukum. Namun, sampai dengan saat ini baik Puskesmas maupun Dinas Kesehatan tidak menjalankan secara tegas mekanisme pemberian sanksi bunga sebesar 2% atas retribusi yang tidak atau kurang bayar sebagaimana tertuang dalam Perda retribusi jasa umum.

Puskesmas belum pernah menerapkan sanksi tersebut dan memilih mengambil langkah persuasif dengan menanyakan langsung alasan yang mendasari wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya. Jika wajib retribusi tidak mau membayar juga maka terhadap wajib retribusi maka ada surat teguran yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas. Penerapan sanksi yang tegas dalam penegakan hukum menjadi elemen penunjang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya sehingga proses pengadministrasian retribusi pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal⁹

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Kismed, Kepala Kesehatan Kota Singkawang.

3. Petugas Retribusi Parkir Jalan Umum

- a. Petugas Parkir di Kota Singkawang belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Singkawang.
 - b. Petugas Parkir di Kota Singkawang belum mendapat pelatihan yang memadai.¹⁰
- b. Sarana dan prasarana retribusi jasa umum yang kurang memadai.

Sarana dan prasarana pasar merupakan penunjang utama dalam kegiatan pasar setiap hari. Apabila sarana dan prasarana yang dimiliki pasar cukup memadai akan membuat para pedagang yang menempati merasa nyaman dan tidak sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari. Di beberapa pasar yang ada di Kota Singkawang, sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai. Ini membuat para pengguna pasar merasa tidak nyaman dan sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari bila uang tersebut tidak digunakan untuk menunjang kegiatan pasar. Sehingga membuat mereka malas membayar retribusi pasar. Sebagai contoh bangunan kios, loos, pelataran, bangunan/saluran air, penerangan dan kebersihan pasar.¹¹

1. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kurang memadai sehingga tidak seimbang dengan melonjaknya pasien yang tengah dirawat.
- Berbagai indikator kinerja seperti fasilitas kamar, obat yang mahal,

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Budiyo, Kepala Seksi Parkir dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang.

¹¹ hasil wawancara dengan Bapak Deddy Zahedi, Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

pembedaan pelayanan terhadap masyarakat dilihat dari sisi ekonomi. Harus diakui, penilaian kinerja pelayanan kesehatan yang kurang baik erat kaitannya dengan implementasinya yang kurang memberikan kepuasan terhadap masyarakat karena terjadi diskriminasi terhadap pasien/masyarakat yang berobat.¹²

2. Sarana dan prasarana seperti area parkir yang kurang dan sempit sehingga pengguna jasa parkir membutuhkan waktu 5-20 menit untuk memarkirkan kendaraan mereka.¹³

2. Subtansi

Yang menjadi hambatan dari subtansi adalah :

1. Muatan/materi minimal yang diatur dalam peraturan daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) untuk muatan materi yang diatur dalam perda pajak daerah dan Pasal 156 ayat (3) untuk muatan materi yang diatur dalam perda retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.
2. Muatan/materi yang diatur dalam peraturan daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, misalnya :
 - a. Objek pajak dan retribusi daerah diperluas melebihi yang ditentukan dalam UU No.28 tahun 2009 dan pengecualian objek pajak dan retribusi daerah dikurangi dari yang ditentukan dalam UU No.28 tahun 2009.
 - b. Tarif pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (3) UU No.28 tahun 2009, yang menyatakan bahwa tarif PDRD harus diatur dalam Perda.

¹² Hasil Wawancara Dengan Ahmad Kismed, Kepala Kesehatan Kota Singkawang.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Budiyo, Kepala Seksi Parkir dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang.

b.

3. Pengenaan retribusi atas fungsi pelayanan dan perizinan yang bukan merupakan kewenangan daerah bersangkutan, yang bertentangan dengan Pasal 149 UU No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kewenangan Retribusi Jasa Umum dan Perizinan Tertentu disesuaikan dengan kewenangan daerah masing masing yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
4. Terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa belum adanya atau belum lengkapnya beberapa aturan hukum dalam pelaksanaan retribusi jasa umum khususnya retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kesehatan. Aturan Hukum tersebut adalah Peraturan Walikota maupun Surat Keputusan Walikota yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

3. Kultur

Yang menjadi hambatan dari kultur adalah dari masyarakat yang wajib membayar retribusi jasa umum khususnya retribusi pelayanan pasar. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar merupakan masalah pokok dan klasik dalam pelaksanaan retribusi pasar di Kota Singkawang. Karena lemahnya kesadaran wajib retribusi ini, mereka selalu mencari cara dan alasan agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi. Beberapa kasus ditemui satu orang pedagang menempati lebih dari satu meja dengan alasan kecilnya meja dan hanya dapat ditarik retribusi pelayanan pasar atas satu orang pedagang tersebut. Hambatan lain adalah masih ada pedagang yang sulit

ditertibkan untuk masuk dalam lokasi los dan berdagang di luar lokasi alasannya lebih dekat dengan konsumen. Hal ini berakibat pada kecemburuan pedagang yang telah menempati los dan menjadikannya alasannya untuk tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Mereka tidak menyadari pentingnya membayar retribusi demi pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tempat mereka mencari nafkah. Mereka tidak menyadari bahwa untuk memperoleh pasar yang baik dan nyaman memerlukan dana untuk pemeliharaan dan operasional, di mana salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan retribusi pasar.

C. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam Rangka Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Setiap masalah harus dicari penyelesaian agar kembali menjadi baik. Dalam hal ini hambatan pelaksanaan retribusi jasa umum harus dicari solusi agar implementasi retribusi retribusi jasa umum dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi retribusi jasa umum sesuai yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta di peroleh peningkatan penerimaan retribusi jasa umum dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Struktur

Secara struktur terbagi atas 2 (dua) hal agar tugas implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

dapat berjalan secara optimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu sarana dan prasarana dan pelaksana teknis.

a. Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi jasa umum, pemerintah Kota Singkawang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, yang meliputi :
 - Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, - penyesuaian tarif perda sesuai kondisi sekarang,
 - Penyesuaian system pelaksanaan pungutan di lapangan.
- 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian, meliputi :
 - pengawasan dan pengendalian yuridis,
 - pengawasan dan pengendalian teknis,
 - pengawasan dan pengendalian penatausahaan dalam rangka tertib administrasi.
- 3) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD
- 4) Penegakan sanksi Perda secara konsekuen.¹⁴

2. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dinas kesehatan dalam mengatasi tantangan globalisasi dibidang kesehatan seperti menambah jumlah dokter umum/spesialis dan perawat. Para pelaksana retribusi pelayanan kesehatan harus diberi pengertian bahwa mereka adalah garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penarikan retribusi. Berarti jika tidak

¹⁴ hasil wawancara dengan Bapak Deddy Zahedi, Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

ada mereka, pembiayaan akan pembangunan terhenti. Di lain pihak, jika pembangunan terhenti maka penarikan retribusi pun tidak ada atau mereka akan kehilangan pekerjaan. Mutu pelaksana retribusi ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan (Diklat). Selanjutnya dengan meningkatkan fasilitas dan prasarana kesehatan seperti menambah jumlah kamar pasien, menyediakan peralatan canggih yang bermanfaat untuk pasien dan lain sebagainya.

3. Substansi

Diperlukannya perangkat hukum yang lengkap agar tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah tentang retribusi jasa umum dapat berjalan secara optimal hingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya jangka pendek dengan memaksimalkan perangkat hukum yang ada dengan melengkapi petunjuk teknis yang jelas diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Walikota maupun Surat Keputusan Walikota yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Untuk menanggulangi rasa tidak puas wajib retribusi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pelaksana retribusi, maka UPT Metrologi dan Pasar telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar secara murni dan fair dengan cara memberi pengertian dan pembekalan kepala petugas pungut untuk melaksanakan Perda tersebut secara adil kepada semua wajib retribusi tanpa membedakan apapun, serta memberi sanksi kepada petugas yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan isi Perda tersebut atau memberi pelayanan yang tidak adil pada semua

wajib retribusi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan para wajib retribusi merasa di perlukan secara adil. Sehingga diharapkan peningkatan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar.

4. Kultur

a. Dengan mengadakan sosialisasi

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, maka UPT Metrologi Legal dan Pasar mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Yakni melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang selama ini terdapat pemikiran negatif masyarakat atas perbedaan antara pasien kaya dan pasien miskin, maka pihak/dinas terkait dapat melakukan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat.

b. Pembinaan yang berkesinambungan untuk para wajib retribusi pelayanan pasar yang melanggar aturan. Pembinaan tersebut dilakukan untuk para pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang disediakan.

c. Dalam kaitannya dengan pajak parkir jalan umum upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pembentukan asosiasi pengelola parkir yang terdiri dari para pengelola / pemilik gedung komersial Membuat

kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik dan para perusahaan jasa pengelola parkir, melakukan pembinaan terhadap petugas parkir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 khususnya menyangkut Retribusi Pelayanan Pasar, pemerintah menetapkan target yang harus dicapai atau direalisasikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 target penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar kurang memenuhi harapan pemerintah kota Singkawang, hal ini disebabkan manajemen retribusi pasar yang kurang tertib. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya-upaya berikut, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga didapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan pemunggutan retribusi pasar. Selain upaya-upaya penanggulangan tersebut. Hal ini juga terjadi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan baik yang dipungut dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi yang sangat besar dalam struktur penerimaan dari Retribusi Jasa Umum bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang. Namun demikian, besarnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan ini juga dibarengi dengan besarnya penganggaran dalam APBD untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang.

2. Hambatan-hambatan yang menyebabkan belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat mengakibatkan implementasi pelayanan jasa umum di kurang maksimal, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai dan Sumber Daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung menjadi kurang maksimalnya optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang isi perda, merivisi isi perda dengan menambahkan sanksi hukum yang tegas dalam pemugutan retribusi jasa umum dan memberikan pelatihan/diklat kepada petugas pelaksana peraturan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progesif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Friedman, M. Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Friedrich, Joachim, Carl. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Hadjon, M, Philipus, dkk. *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Hadjon, M, Philipus, dkk. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Harun, Hamrolie. *Menghitung Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Kelsen, Hans. *Teori Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: Bayu Media, 2004
- Lukman, Markus. *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*. Pontianak: PMIH Untan Press, 2007.
- Lukman, Markus. *Penerapan Metode Statistik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum*. Pontianak: PMIH Untan Press, 2007.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Saebani, Ahmad, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Siahaan, Pahala, Marihot. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sinamo, Nomensen. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soeharyo Salamoen dan Effendy Nasri. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2006.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soemitro, Hanitjo, Ronny. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV Agung, 1990.
- Soemitro, Hanitjo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jerimentri*. Jakarta: Galia Indonesia, 1990.
- Soemitro, Rochmat dan Sugiharti, Kania, Dewi. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Soetiskno, Mr. *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Subkhi, Ahmad dan Jauhar, Ahmad. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sukrisno, Didik. *Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- utopo dan Suryanto, Adi. *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2006.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

